



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 467 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PENDAFTARAN DAN PELEPASAN VARIETAS  
TANAMAN PADI GOGO UNGGUL LOKAL DAN VARIETAS BUAH UNGGUL LOKAL  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian pada kegiatan Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman Padi Gogo Unggul Lokal dan Varietas Buah Unggul Lokal Kabupaten Tabalong Tahun 2023 yang dilaksanakan secara swakelola kerjasama dengan Badan Riset Inovasi Daerah, maka perlu membentuk Tim Swakelola Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman Padi Gogo Unggul Lokal dan Varietas Buah Unggul Lokal Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC/040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Swakelola Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman Padi Gogo Unggul Lokal dan Varietas Buah Unggul Lokal Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Koordinator Peneliti;
  - b. Anggota Peneliti; dan
  - c. Tenaga Surveyor dan Pengolah Data.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator Peneliti:
    1. mengkoordinasikan, merumuskan dan mengarahkan ruang lingkup penelitian dan non-penelitian;
    2. merencanakan jadwal kegiatan;
    3. mengadakan dan memimpin rapat-rapat teknis pelaksanaan;
    4. melakukan pengolahan dan evaluasi data atas hasil kegiatan;
    5. menyusun laporan substansi secara berkala dan disampaikan kepada pihak Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong atau yang bertanggungjawab dan Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat-Universitas Lambung Mangkurat atau yang bertanggung jawab serta melakukan penulisan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan; dan
    6. dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Peneliti bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tabalong dan Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat-Universitas Lambung Mangkurat.

- b. Anggota Peneliti:
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penelitian dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penelitian;
  2. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan perangkat penelitian;
  3. bertindak selaku supervisor/pelaksana dalam pengumpulan data lapangan;
  4. menyelenggarakan pengolahan data dan analisis data; dan
  5. dalam melaksanakan tugasnya peneliti bertanggungjawab kepada Koordinator Peneliti.
- c. Tenaga Surveyor bertugas melaksanakan pengumpulan data dan observasi di lapangan; dan
- d. Pengolah data bertugas melaksanakan analisis dan pengolahan data hasil penelitian.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Oktober 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ *467* /2023  
 TANGGAL *27 November 2023*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA PENDAFTARAN DAN PELEPASAN  
 VARIETAS TANAMAN PADI GOGO UNGGUL LOKAL DAN VERIETAS BUAH  
 UNGGUL LOKAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Dr. Ir. Aidi Noor, MP	Koordinator Peneliti (Selaku Ketua Pelaksana)	Honor diberikan
2.	Ir. Rina D. Ningsih, M.Si	Anggota Peneliti	sesuai RAB yang telah disusun
3.	Nurmili Yuliani, S.P., M.Sc	Anggota Peneliti	
4.	Khairatun Napisah, S.P., M.Sc	Anggota Peneliti	
5.	Puspita Harum Maharani, SP.,MSc	Anggota Peneliti	
6.	Dr. Indrastuti Apri Rumanti, S.P., M.Si	Anggota Peneliti	
7.	Dr. Eni Maftu'ah, SP., M.P.	Anggota Peneliti	
8.	Dr. Ir. Izhar Khairullah, M.P	Anggota Peneliti	
9.	Ir. Muhammad Saleh, M.P.	Anggota Peneliti	
10.	Dr. Ir. Muhammad Alwi, M.S.	Anggota Peneliti	
11.	H.Kurdiansyah,SP.,M.P	Anggota Peneliti	
12.	Endang Susilowati Dwi Hartati,SP.,MP	Anggota Peneliti	
13.	Rusmila Agustina	Tenaga Surveyor	
14.	Yuyun Rahmawati, S.P. M.P	Tenaga Surveyor	
15.	Subandana, S.P	Tenaga Surveyor	

BUPATI TABALONG,   
 ENDANG SYAKHFIANI